

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah Kolonial di Indonesia tidak hanya meninggalkan catatan tentang politik dan ekonomi, tetapi juga berbagai peninggalan fisik yang masih dimanfaatkan hingga kini. Pada masa kolonial Banjoewangi (Banyuwangi) menjadi salah satu wilayah strategis bagi pemerintah Belanda di ujung timur Pulau Jawa. Secara sepenuhnya Belanda menguasai wilayah Banyuwangi diperkirakan sekitar tahun 1912, lebih lama ditaklukkan dari pada wilayah Bali yang sudah ditaklukkan sejak tahun 1906. Kekuasaan Belanda di Banyuwangi tidak dapat dilepaskan dari Sejarah runtuhnya Kerajaan Blambangan pada akhir abad ke-18. Sejak saat itu Belanda mulai menata Banyuwangi sebagai bagian dari wilayah administrasi Keresidenan Besoeki yang meliputi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo. Letak Geografis wilayah Banyuwangi menjadikan Banyuwangi sangat strategis baik untuk jalur perdagangan maupun perkembangan Perkebunan. Tanah yang subur serta iklim tropis yang mendukung, Banyuwangi dipandang sebagai daerah agraris potensial untuk menunjang kepentingan ekonomi kolonial.

Belanda kemudian memperluas kontrolnya dengan melakukan pembukaan hutan, konversi lahan, dan pengembangan Perkebunan besar seperti, Perkebunan kopi, tebu, cengkeh, dan padi yang hasilnya diekspor untuk kepentingan pasar internasional. Sehingga, Besoeki tumbuh menjadi salah satu pusat Perkebunan swasta yang pesat. Perluasan lahan hingga pembukaan hutan menjadikan hasil pertanian di wilayah ini meningkat tajam (Nuriansyah, 2022). Predikat Banyuwangi sebagai sentra penghasil beras terus berlanjut hingga tahun 1900, Van Gent pada tahun 1913 melaporkan bahwa konversi hutan menjadi lahan pertanian terjadi di wilayah Kalibaru dan Cluring. Pada tahun 1910-1920 ada sekitar 180.000 hektar lahan pertanian baru. Namun pada tahun 1920-1930 skala ekspansi mulai menurun, dalam dekade tahun ini lebih dari 50.000 hektar lahan baru telah ditambahkan. Wilayah Kalibaru dijadikan pusat perluasan lahan kolonial Belanda dan Wilayah Grajagan menjadi wilayah penyangga. Selain itu pemerintah kolonial Belanda

membuka lahan pertanian di wilayah Bajulmati dan Pesanggaran (Nawiyanto, 2019)

Pada akhir abad ke-19, kehidupan masyarakat di Hindia Belanda banyak dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi kolonial yang bersifat eksploitasi, terutama melalui sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) sejak tahun 1830. Kondisi ini menimbulkan penderitaan dikalangan rakyat, sementara Belanda meraih keuntungan besar. Kesadaran akan ketimpangan tersebut mendorong Conrad Theodor Van Deventer menulis artikel berjudul “*Een Eereschuld*” (Hutang Kehormatan) pada tahun 1899. Ia menegaskan bahwa Belanda memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan sebagian keuntungan itu kepada rakyat Hindia. Gagasan ini kemudian memengaruhi arah kebijakan kolonial yang melahirkan Politik Etis (*Ethische Politiek*) pada awal abad ke-20. Kebijakan ini dikenal dengan konsep *Trias Van Deventer*, yang meliputi edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan emigrasi (perpindahan penduduk), dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi. Politik etis juga mengubah pandangan dalam politik kolonial yang selama ini beranggapan bahwa Hindia Belanda tidak lagi sebagai *wingwest* (daerah yang menguntungkan) tetapi menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (Dewi, 2025).

Salah satu wujud nyata dari politik etis adalah Pembangunan infrastruktur irigasi, seperti Bendungan dan saluran air, untuk meningkatkan hasil pertanian di Hindia Belanda. Contohnya terlihat di Keresidenan Besoeki yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo. Di Bondowoso, Pembangunan irigasi di sekitar sungai Bedadung membuat wilayah ini berkembang sebagai pusat pertanian dan Perkebunan untuk kebutuhan ekspor. Hal yang sama juga dilakukan di Banyuwangi, Jember dan Probolinggo. Di Banyuwangi, khususnya daerah Bago dan Karangdoro, lahan pertanian diperluas guna mendukung target panen. Sebagai daerah agraris Banyuwangi memiliki jaringan irigasi modern seperti Bendungan, Bendungan merupakan bangunan air yang dibangun secara melintang sungai, sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, bendungan berfungsi menjadi penangkap air dalam jumlah besar untuk kebutuhan irigasi maupun kebutuhan lainnya (Sosrodarsono, 2016).

Adanya perluasan lahan pertanian tentu membutuhkan dukungan irigasi agar hasil panen bisa optimal. Karena itu, pemerintah Kolonial mulai membangun berbagai jaringan irigasi untuk menunjang kebutuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satunya ialah pembangunan bendungan Karangdoro yang terletak di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bendungan karangdoro dibangun pada tahun 1921 oleh insinyur pribumi yaitu Ir. Sutejo yang berasal dari Jawa Tengah, bendungan Karangdoro merupakan bendungan terbesar ke dua setelah bendungan gembleng yang dibangun pada masa kolonial belanda. Bendungan ini memiliki luas 16.044 hektar dibangun dengan menggunakan jasa “*kaum perantaraan*” sebutan bagi orang-orang yang kala itu melakukan tindakan kriminal dan menjadi tawanan Belanda.

Kemudian pada tahun 1929 bendungan Karangdoro pernah mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang yang menerjang Banyuwangi Selatan. Menurut sumber koran lokal yang berjudul “*De Indische Courant*” yang terbit pada tanggal 20 Juli 1939, menyinggung mengenai banjir bandang yang menimpa bendungan Karangdoro. Dikatakan bahwasanya banjir tersebut setinggi 17 meter dan menerjang ternak dan Perkebunan yang berada disekitar bendungan, Dalam pemulihan bendungan daerah aliran sungai Karangdoro dan irigasi Banyuwangi Selatan dihentikan total untuk sementara dalam batas waktu yang belum ditentukan dikarenakan untuk memperbaiki bendungan Kembali.

Pada tahun 1939 pemerintah belanda memberikan subsidi untuk pekerjaan irigasi kepada *Gouvernement Oost-Java* (Pemerintah Jawa Timur). Subsidi tersebut terkait kerusakan bendungan Karangdoro akibat banjir di Banyuwangi Selatan, subsidi tersebut diharapkan untuk pemulihan daerah sungai bendungan, dan direncanakan pemulihan bendungan diharapkan rampung dalam waktu selama 9 bulan. Namun bendungan Karangdoro dapat beroperasi Kembali dan diresmikan pada tahun 1942 pada masa pemerintahan kedudukan Jepang.

Kemudian paska kemerdekaan Indonesia bendungan ini diambil alih oleh pemerintahan Indonesia, dan dinaungi langsung oleh dinas pengairan Banyuwangi. Bendungan Karangdoro mencerminkan semangat kebersamaan dan nilai gotong royong yang kuat dalam budaya masyarakat Banyuwangi. Sehingga pada tahun 1963 munculah tradisi ‘Bubak Bumi’ sebagai wujud puji Syukur atas berkah air

dan hasil panen, tradisi tersebut merupakan sebuah upacara selamat tahunan yang rutin diselenggarakan di sekitar bendungan Karangdoro sejak tahun 1963 sampai sekarang.

Nama bendungan Karangdoro sendiri menyimpan Sejarah yang erat dengan masa kolonial Belanda. Kata “karang” dapat dimaknai sebagai “rancangan” atau sesuatu yang direncanakan. Hal ini merujuk pada proses Pembangunan bendungan yang memang digagas dan dirancang pada masa pemerintahan kolonial belanda di Banyuwangi. Sementara itu, kata “doro” sering dihubungkan dengan penyebutan untuk orang belanda atau kaum kolonial yang berkuasa pada masa itu. Jika kedua istilah ini digabungkan, maka nama Karangdoro secara sederhana bisa diartikan sebagai “Bendungan yang direncanakan oleh Belanda”.

Sejak awal berdirinya, Bendungan Karangdoro memang ditujukan untuk mendukung sektor pertanian. Air dari bendungan ini dialirkan ke berbagai wilayah persawahan yang berada di bawah pengelolaan tiga Kordsa, yaitu Pesanggaran, Bangorejo, dan Cluring. Total lahan sawah yang mendapat pasokan air mencapai sekitar 16.165 hektare. Rinciannya, Kordsa Pesanggaran bertanggung jawab atas 4.381 hektare sawah, Bangorejo mengelola sekitar 5.981 hektare, sedangkan Cluring mencakup kurang lebih 5.803 hektare. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal bendungan tidak hanya menjadi proyek fisik kolonial, tetapi juga berperan langsung dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.

Hingga saat ini, Bendungan Karangdoro masih berfungsi dengan baik meskipun usianya sudah sangat tua. Bendungan ini berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi, yang secara rutin melakukan kegiatan pemeliharaan, seperti pengeringan dan pembersihan, agar aliran air tetap lancar dan daya tampung bendungan terjaga. Fakta bahwa bendungan ini masih aktif digunakan hingga sekarang membuktikan bahwa warisan infrastruktur kolonial Belanda di Banyuwangi memiliki peran penting yang terus berlanjut, dari masa penjajahan hingga era modern. Bagi masyarakat petani, keberadaan bendungan ini tetap menjadi penopang utama dalam menjaga produktivitas pertanian, sekaligus bukti nyata bagaimana campur tangan kolonial Belanda di masa lalu meninggalkan jejak yang masih dirasakan hingga kini

Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya Bendungan Karangdoro bukan sekadar bangunan air yang dibuat untuk irigasi. Sejak dibangun di bangun pada masa kolonial Belanda, bendungan ini sudah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat sekitar khususnya dalam ekonomi. Selain itu juga sebagai warisan sejarah kolonial dan warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat Banyuwangi. Keberadaannya menjadi bukti nyata dari kebijakan kolonial Belanda dalam bidang agraria, penggerak penting sektor pertanian yang menopang kehidupan masyarakat, serta melahirkan tradisi lokal yang akan terus dilestarikan antar generasi. Dengan demikian, penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga persoalan pokok berikut:

Pertama, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam mengenai sejarah keberadaan Bendungan Karangdoro, bagaimana bendungan tersebut dapat dibangun, bagaimana proses pembangunan bendungan tersebut, dan bagaimana bendungan tersebut dapat menjadi warisan kolonial Belanda yang eksistensinya masih ada sampai sekarang. Dikarenakan belum ada yang mengkaji mengenai sejarah dari bendungan ini, dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menjadikan upaya pelestarian sejarah bendungan tersebut agar tidak tergerus oleh generasi yang akan mendatang.

Kedua, dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan bendungan Karangdoro, bagaimana bendungan ini berdiri kokoh selama puluhan tahun, apakah menimbulkan dampak positif atau sebaliknya. Bendungan Karangdoro ini menjadi penopang cadangan air bagi perkebunan, lahan pertanian, peternakan, dan sumber air bersih ketika kemarau datang. Dampak yang signifikan dari pembangunan bendungan ini menonjol ke sektor ekonomi dan sektor budaya, tradisi Bubak Bumi yang muncul pada masa paska kemerdekaan yang dilatarbelakangi proses pembangunan bendungan ini menjadi tradisi tahunan yang akan terus ada dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya.

Terakhir, pemanfaatan bendungan Karangdoro sebagai sumber belajar dalam konteks sejarah sangat minim, baik dalam sekolah maupun dalam pengembangan kurikulum sejarah nasional. Sejatinya bendungan, bukan hanya sebagai bangunan infrastruktur irigasi saja tetapi menyimpan nilai-nilai historis dan menjadi saksi perjalanan masyarakat dari mas ke masa.

Sehingga, Bendungan Karangdoro dapat menjadi salah satu sumber belajar sejarah khususnya bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana diamanatkan oleh Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mendorong siswa untuk belajar dari lingkungan sekitar, melalui pembelajaran kontekstual, proyek berbasis lingkungan dalam P5, sehingga Bendungan ini mempunyai potensi untuk dijadikan sumber belajar sejarah yang penting bagi siswa SMA. Menurut hasil wawancara pada tanggal 19 Februari dengan guru sejarah Ibu Latiffatun Nasiroh (32 tahun) mengatakan bahwa “Keberadaan Bendungan Karangdoro memang sudah ada sejak pemerintahan Kolonial Belanda, sehingga berkaitan dengan materi pembelajaran sejarah tingkat lanjut kelas XI, yaitu mengenai Kolonialisme dan Imperialisme” Sejalan dengan itu, Kurikulum Merdeka telah menetapkan Capaian Pembelajaran Sejarah Indonesia Fase F (Kelas XI) CP 11.2. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis perkembangan masyarakat Indonesia dalam konteks Sejarah Global (kolonialisme, imperialisme, perang dunia, nasionalisme) serta mengaitkan dengan perkembangan dunia masa kini. Berkaitan dengan hal tersebut, Bendungan Karangdoro memiliki peran yang sangat penting sebagai bahan ajar dalam mata pelajaran Sejarah di SMA, karena mencerminkan dampak kebijakan kolonial Belanda di bidang agraris, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Melalui studi tentang bendungan ini, siswa dapat memahami bagaimana infrastruktur peninggalan kolonial masih berpengaruh terhadap kehidupan modern sekaligus mengembangkan ketrampilan berpikir kritis dalam menganalisis sejarah lokal sebagai bagian dari pembelajaran yang kontekstual dan bermakna.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian terhadap Bendungan Karangdoro sebagai situs sejarah yang belum banyak diungkap. Selain sebagai peninggalan kolonial yang memiliki dampak sosial ekonomi signifikan bagi masyarakat Banyuwangi bendungan ini juga merepresentasikan kearifan lokal melalui tradisi Bubak Bumi. Penelitian ini diharapkan mampu mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dengan menghadirkan sumber belajar sejarah kontekstual yang dekat dengan kehidupan siswa dan masyarakat sekitar. Demikian, penulis berupaya mengkaji “Bendungan Karangdoro Banyuwangi (Sejarah, Dampak dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA)”. Kajian terhadap Bendungan Karangdoro di harapkan

dapat menambah wawasan berbagai pihak mengenai keberadaan dan peran Bendungan di berbagai daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya bendungan Karangdoro Banyuwangi?
2. Bagaimana dampak bendungan Karangdoro Banyuwangi terhadap masyarakat sekitar?
3. Apa saja potensi yang dimiliki oleh bendungan Karangdoro Banyuwangi untuk dijadikan sumber belajar Sejarah di SMA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui Sejarah berdirinya bendungan Karangdoro Banyuwangi
2. Untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan dalam Pembangunan bendungan Karangdoro Banyuwangi
3. Untuk mengetahui potensi yang ada dalam bendungan Karangdoro Banyuwangi untuk dijadikan sumber belajar sejarah di SMA

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapatkan dai penelitian mengenai bendungan Karangdoro Banyuwangi yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat khususnya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya terkait dengan Sejarah bendungan Karangdoro Banyuwangi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat kepada berbagai pihak terkait yaitu:

- a. Penulis, mampu mengembangkan dan mengimplementasikan semua potensi keilmuan yang penulis miliki serta dapat mengetahui “Bendungan Karangdoro sebagai sumber belajar Sejarah di SMA”.
- b. Guru, mampu bermanfaat dalam memberikan informasi dan wawasan serta mampu bermanfaat berkontribusi dalam proses pengembangan dan penyampaian materi pembelajaran dengan memanfaatkan bendungan Karangdoro Banyuwangi.
- c. Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang keberadaan bendungan Karangdoro Banyuwangi nantinya dapat menumbuhkan kesadaran Sejarah dikalangan masyarakat untuk tetap menjaga kelestariannya.
- d. Peneliti lain, mampu memotivasi untuk melaksanakan penelitian serupa atau isu serupa, semoga kajian ini dapat memberikan informasi dan motivasi.
- e. Program Studi Pendidikan Sejarah, Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penulisan topik sejenis.